

Dirty Vote Film: Unruly Politics Movement In Digital Space

Farabi Ferdiansah

Farabi Ferdiansah, Media Practice for Development and Social Change,
University of Sussex Brighton, UK; farabiferdiansyah@gmail.com

Artikel diterima: 31 Oktober 2024; Diperbaiki: 24 November 2024; Disetujui: 30 November 2024

Abstract

Dirty Vote: Unruly Politics Movement in Digital Space analyzes the impact of the documentary film 'Dirty Vote' which released during Indonesia's pre-election quiet period. This documentary exposes alleged election fraud and abuses of power under President Joko Widodo's leaders. Dirty Vote represents a form of unruly politics, challenging formal political structures and fostering public discourse on political transparency. The term "unruly politics" is used to describe political engagement that operates outside conventional norms and institutions. In this case, *Dirty Vote* symbolizes a non-traditional, confrontational form of political discourse that utilizes digital media to bypass official restrictions. Through digital platforms, Dirty Vote has significant attention, underscoring the role of social media in amplifying marginalized voices and circumventing governmental restrictions. This analysis situates the film within broader discussions of digital activism, demonstrating how digital spaces enable citizens to address systemic political issues and advocate for democratic integrity.

Key words: *Dirty Vote, Unruly Politics, Digital Space, Digital Activism, Digital Movement, Communication for Development*

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/jsj.v6i2.42168>

Citation: Ferdiansah, Farabi, (2024), *Dirty Vote Film: Unruly Politics Movement In Digital Space*. *Jurnal Studi Jurnalistik* (6), 2, 83-89, doi: 10.15408/jsj.v6i2.42168

A. PENDAHULUAN

Economist Intelligence Unit (EIU) melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, dari 6,71 pada tahun 2021 menurun menjadi 6,53 di tahun 2023. Angka ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat 56 dunia, di bawah Malaysia (40), Timor Leste (45), dan Filipina (53) di Asia Tenggara (Democracy Index 2023 Age of Conflict, 2024).

Founder Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani mengatakan bahwa pelemahan partai oposisi di legislatif dan kurangnya pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan¹ menjadi salah

satu indikator menurunnya demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar partai yang berada di pihak pemerintah, sehingga ini membuat kecenderungan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan pemerintah, atau koalisinya. Sehingga check and balance dalam pemerintahan menjadi tidak optimal. Selain itu, kesetaraan di depan hukum telah menjadi isu besar di Indonesia karena banyaknya kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa yang mengkritik pemerintah².

Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia tepat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Jokowi mendapatkan stigma buruk karena disinyalir

¹ Saptohutomo, A.P. (2023) *Pakar ungkap skala demokrasi indonesia terus menurun*, *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/11375781/pakar-ungkap-skala-demokrasi-indonesia-terus-menurun> (Accessed: 21 February 2024).

² Saptohutomo, A.P. (2023) *Pakar ungkap skala demokrasi indonesia terus menurun*, *KOMPAS.com*.

menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menurunkan batas usia minimum calon presiden. Keputusan ini memungkinkan calon presiden di bawah 40 tahun bisa maju dalam pemilihan presiden. Perubahan ini sontak membuka jalan bagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini berusia 36 tahun, bisa mengikuti konstestasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Widadio, 2024). Indikasi ‘cawe-cawe’ inilah yang menjadi salah satu faktor latar belakang munculnya film *Dirty Vote: Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024*, yang dirilis pada 11 Februari 2024 di YouTube, pada masa tenang Pemilu.

Artikel ini menganalisis film *Dirty Vote* sebagai Unruly Politics, gerakan politik yang membangkang, atau sulit diatur di ruang digital. Ruang digital mencakup realitas virtual, internet, film, video, platform media sosial seperti Facebook, dan konten digital lainnya. Ruang ini menekankan komunikasi dan interaksi perangkat digital serta infrastrukturnya³

B. METODE

Unruly Politics atau politik yang membangkang merujuk pada tindakan politik oleh yang tidak melibatkan partisipasi dalam struktur politik tradisional. Unruly politics mengkaji gerakan politik diluar definisi konvensional dan gerakan politik tradisional. Tindakan ini bisa meliputi tindakan yang melanggar hukum, mengganggu, atau bersifat kekerasan, yang mungkin menyimpang dari konsep-konsep politik konvensional mengenai keterlibatan warga negara atau partisipasi demokrasi⁴. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap krisis yang teridentifikasi dalam struktur sosial dan tata kelola, yang mendorong warga negara untuk mengeksplorasi metode partisipasi politik baru guna membawa perubahan⁵.

³ Benyon, D. (2014) ‘Digital space’, in Benyon, D., *Spaces of Interaction, Places for Experience*. Cham: Springer International Publishing, pp. 37–44.

⁴ Khanna, A. et al. (2013) *The changing faces of citizen action a mapping study through an ‘unruly’ lens*. Brighton IDS 2013 (IDS working paper, 423).

⁵ Khanna, A. (2012) ‘Seeing citizen action through an “unruly” lens’, *Development*, 55(2), pp. 162–172.

Unruly Politics, menekankan aksi langsung dan gangguan untuk menantang sistem kekuasaan, sementara gerakan politik tradisional mungkin lebih berfokus pada advokasi, lobi, dan pendekatan hukum untuk perubahan⁶. Pendekatan ini melibatkan bahasa politik baru, membingkai ulang aksi politik, menantang lembaga kekuasaan, dan mengembangkan pemahaman baru tentang kekuasaan yang melampaui pemahaman konvensional⁷.

C. PEMBAHASAN

Sebagai Gerakan Politik Pembangkangan

Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter karya Watchdoc Production yang mengungkap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 oleh aparat dan pejabat negara di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Film ini dirilis pada 11 Februari 2024, di tengah masa tenang pemilu pemilihan Presiden periode 2024-2029. Dalam analisa ini, terlihat bahwa *Dirty Vote* sebagai gerakan politik pembangkangan di ruang digital, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 287, Ayat 5 yang menyebutkan:

“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.”

Menurut Professor I Nyoman Nuryana, ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya, film *Dirty Vote* tidak layak dirilis selama periode tenang pemilu. Beliau menyatakan bahwa film ini sangat tendensius dan tidak mencerminkan etika akademik⁸. Nyoman berpendapat bahwa film tersebut cenderung menjadi kampanye hitam, yaitu kampanye yang didasarkan pada rumor dan

⁶ Lettinga, D. and Kaulingfreks, F. (2015) ‘Clashing activism: international human rights organizations and unruly politics’, *Journal of Human Rights Practice*, 7(3), pp. 343–365.

⁷ Khanna, A. et al. (2013) *The changing faces of citizen action a mapping study through an ‘unruly’ lens*.

⁸ Prastyo, D. (2024) *Kata pakar hukum pidana ub soal film dirty vote, detikjatim*.

gossip yang menggunakan berbagai strategi propaganda untuk mencapai tujuannya (Ramadhani, 2018, dikutip dalam Octarina dan Djanggih, 2019). Nyoman juga berpendapat bahwa seseorang yang merasa dirugikan oleh film tersebut dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Prastyo, 2024).

Dandhy Dwi Laksono, sutradara Dirty Vote, berpendapat bahwa merilis film ini pada masa tenang pemilu adalah salah satu strateginya. Ia menunggu momen yang tepat, yaitu ketika euforia politik dan pemberitaan politik sedang berkurang (Sulistya, 2024), dengan harapan mendapatkan atensi dari masyarakat. Dandhy bersama tiga ahli hukum yang menjadi tokoh utama dalam film tersebut menyusun narasi dan fakta yang menunjukkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 (Nurhadi, 2024). Tokoh utama dalam film tersebut merupakan para ahli hukum dari kampus terkemuka dan memiliki rekam jejak dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka adalah Bivitri Susanti akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Feri Amsari Dosen Universitas Andalas dan Peneliti Senior di Pusat Studi Konstitusi, serta Zainal Arifin Mochtar atau Uceng dosen Universitas Gadjah Mada yang juga menjadi Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi. Konten Dirty Vote mengkritisi penurunan demokrasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para elit politik untuk menguntungkan diri pribadi dan bisnisnya.

Para pelaku film ini mengklaim film ini merupakan film non-profit yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tidak untuk komersial semata (Nugroho, 2024). Dandhy, Bivitri, Zainal, dan Feri menyatakan dalam beberapa wawancara media bahwa mereka tidak menerima dukungan finansial dari partai politik atau politisi lain (Ardhi. N, 2024, Nugroho, 2024, CNN, 2024). Tidak ada peserta atau tim produksi yang menerima kompensasi. Mereka menggunakan uang pribadi untuk memproduksi film tersebut. Oleh karena itu, mereka mengklaim masih memiliki hutang untuk membayar sewa peralatan dan studio (Nugroho, 2024).

Munculnya Dirty Vote, menimbulkan beragam pro dan kontra. Salah satu yang kontra

adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Indonesia (Foksi). Foksi melaporkan para pelaku Dirty Vote ke polisi pada 13 Februari 2024. Foksi, yang merupakan faksi yang berafiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), – Partai yang dipimpin oleh Kaesang putra Presiden Jokowi, menegaskan bahwa film tersebut sengaja dibuat untuk merusak reputasi salah satu calon presiden tertentu (Carolina, 2024). Foksi menilai film ini sarat dengan pelanggaran hukum (Carolina, 2024).

Gerakan Politik Pembangkangan di Ruang Digital

Unruly politics atau politik pembangkangan tidak melulu bersifat anarkis, misalnya melakukan demonstrasi dengan membakar ban, menghalangi jalan atau melakukan kekerasan. Cakupan *unruly politics* sangatlah luas, mencakup baik tempat fisik seperti jalanan maupun platform virtual seperti Internet, Facebook, Instagram, dan YouTube (Khanna, 2012). Melalui medium ini, individu dapat meningkatkan kesadaran, mengkoordinasikan protes, membagikan sumber daya, memperbesar dampak, dan menjangkau audiens global (Carney, 2016).

Film Dirty Vote diunggah pada dua kanal YouTube yang berbeda, yakni PSHK Indonesia dan Dirty Vote Official Channel. Keduanya dipublikasikan secara bersamaan pada 11 Februari, pada masa tenang pemilihan Pilpres. Dalam beberapa jam, film dokumenter ini tersebar dengan cepat, mendapatkan jumlah penonton dalam waktu singkat, menjadi topik tren di X dan TikTok⁹, serta menghiasi berita utama di Indonesia. Dalam waktu singkat, banyak advokat hukum dan politisi yang ikut mempublikasikan film ini, sehingga memperluas jangkauan dan visibilitasnya, seperti Abraham Samad (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2011–2015) dan Refly Harun (mantan staf ahli Presiden 2014). Pada hari pertama, tercatat Dirty Vote mendapatkan 6,4 juta penonton (Eka Mulyana, 2024) dan 20 juta penonton pada hari ketujuh (Septiawan, 2024). Sebelum pemilihan Presiden, potongan film ini tersebar di sosial media dan banyak dipromosikan oleh para netizen.

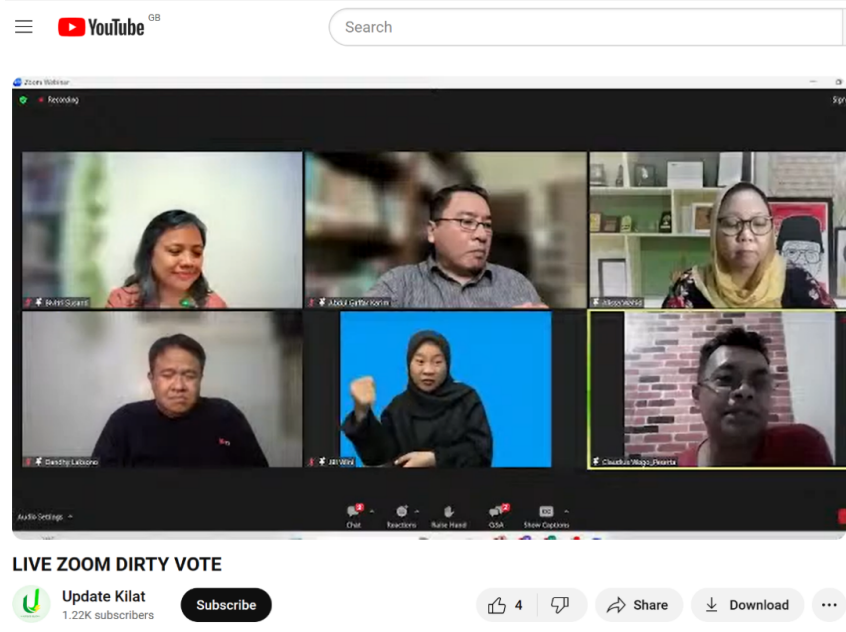
Dirty Vote memantik aksi kolektif untuk terlibat dalam dialog di berbagai platform media digital, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu

⁹ Meliana, R. (2024) *Viral komentar-komentar tentang film dirty vote di tiktok, warga x miris: pentingnya pendidikan gratis, suara.com.*

serupa melalui pemutaran publik online dan offline serta diskusi film yang diselenggarakan oleh individu, LSM, dan komunitas di berbagai provinsi. Gerakan ini secara tidak langsung mendorong meningkatnya interaksi komunitas online, jaringan solidaritas, dan platform komunikasi virtual serta aksi kolektif yang masif di media sosial. Dirty Vote dalam konteks unruly politics mampu menciptakan peluang untuk mempertimbangkan cara-cara berbeda dalam

membangun struktur masyarakat dan memperjuangkan jenis demokrasi yang lebih inklusif (Khanna et al., 2013) yang memungkinkan terciptanya masyarakat global yang menyesuaikan diri dan berfungsi di era koneksi warga negara yang beragam, yang dapat disebut sebagai 'interaksi ruang baru' (Drache dan Froese, 2008, hal. 91, dikutip dalam Khanna et al., 2013).

Picture 1. Live Zoom Dirty Vote Discussion by GUSDURian (13/02).



Update Kilat (2024) *Live zoom dirty vote*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=N00lxx2hf2Y>

Picture 2. Dirty Vote Public Screening at Muhammadiyah University of Surakarta (20/02).



M. Taufik, U. (2024) *Dari busyro hingga uceng panaskan nobar dirty vote di ums, PWM Jawa Tengah*. Available at: <https://pwmjateng.com/dari-busyro-hingga-uceng-panaskan-nobar-dirty-vote-di-ums/>

Di sisi lain, film ini juga menimbulkan gejolak di akar rumput. Polisi melarang nobar (nonton bareng) Dirty Vote di beberapa tempat, seperti Creative Hall M Bloc Space di Jakarta dan Wringianom, Jawa Timur, dengan alasan pelanggaran aturan masa tenang kampanye pemilu (Carolina, 2024). Meskipun begitu, film ini masih dapat diakses oleh siapa saja di YouTube, dan melihat potongan-potongan videonya di sosial media. Para netizen dapat mengganggakan dan dengan bebas membagikan film tersebut di ruang digital.

Dengan melakukan publikasi di media sosial, hal ini membuat negara tidak bisa melakukan represi yang lebih jauh (Kelly Garrett, 2006), membuat para netizen dapat berinteraksi dan menciptakan diskusi publik¹⁰ tanpa hierarki antar organisasi (Scott dan Street, 2000, dikutip dalam Kelly Garrett, 2006).

D. KESIMPULAN

Selama dua tahun terakhir, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah memicu protes dari masyarakat, mahasiswa, buruh, aktivis, dan akademisi. Ini ditunjukkan secara terang terangan, tanpa ada pembenahan di dalam pemerintah. Hal inilah yang membuat Dandhy Laksono dan tiga ahli hukum lainnya menciptakan Dirty Vote: Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024, karya film dokumenter yang mengulas beragam kecurangan dan praktik lancung yang dilakukan oleh Jokowi dan para elit politik.

Dirty Vote sengaja dirilis pada saat masa tenang pemilu, di saat masyarakat dan media tidak fokus pada kampanye politik (Sulistya, 2024). Film ini dipublikasikan di kanal YouTube, di mana penegak hukum tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh untuk menahan peredarannya. Dengan melakukan penyebaran di media sosial secara gratis, membuat para netizen bisa berinteraksi dan menciptakan diskusi publik (Carney, 2016)

tanpa hierarki antar organisasi (Scott dan Street, 2000, dikutip dalam Kelly Garrett, 2006).

Meskipun Prabowo dan Gibran muncul sebagai pemenang dalam Pilpres 2024, bukan berarti gerakan ini gagal. Gerakan ini sukses menyita perhatian publik, mengundang partisipasi masyarakat dan memberikan perspektif politik baru. Gerakan ini menyoroti pentingnya teknologi informasi dan komunikasi, media, film, dan ruang digital dalam kerangka membangun kesadaran politik. Artikel ini menganggap bawah keberhasilan gerakan politik pembangkangan tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari prosesnya (Khanna et al., 2013) dan bagaimana gerakan ini memperkenalkan ruang alternatif untuk mendorong masyarakat untuk mengekspresikan suaranya (Tadros, 2012, dikutip dalam Khanna, 2012).

Meskipun pelaku film ini mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum, dan terjadi pelarangan nonton bareng di berbagai provinsi, narasi dan isu yang diangkat dalam film ini mampu tersebar luas dengan masif dalam waktu cepat. Bahkan resistensi tersebut mampu menimbulkan simpati kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, daripada menganggapnya sebagai pencemaran nama baik, orientasi politik yang sinis, dan pelanggaran hukum, saya beranggapan bahwa fenomena Dirty Vote di ruang digital merupakan '*modality of political action*' (Khanna, 2012, hal. 6), untuk mendidik masyarakat. Daripada dianggap sebagai tindakan kriminal, gerakan ini bisa memberikan wawasan tentang politik yang lebih inklusif. Sebagai contoh, kemunculan gerakan seperti pemutaran publik dan keterlibatan masyarakat di media sosial mampu membentuk '*hot issue*' di media mainstream, membangun '*engagement*' yang organik masyarakat.

Namun perlu digarisbawahi, dengan tersebarnya di media sosial, potensi pihak lain menunggangi gerakan ini untuk kepentingan pribadi sangatlah besar. Sebagai contoh, Muhaimin Iskandar, salah satu calon presiden rival dari Prabowo - Gibran, ikut mempromosikan film Dirty Vote, yang memberi kesan bahwa film ini ditunggangi atau dibiayai oleh salah satu pasangan calon presiden. Hal ini tentunya dapat merusak

¹⁰ Carney, N. (2016a) 'All lives matter, but so does race: black lives matter and the evolving

role of social media', *Humanity & Society*, 40(2), pp. 180–199

independensi dan kepercayaan publik terhadap gerakan ini.

REFERENCES:

- Ardhi, N, S. (2024) ‘Ahli hukum ugm zainal arifin tanggapi kontroversi film “dirty vote” - universitas gadjah mada’, 14 February. Available at: <https://ugm.ac.id/id/berita/ahli-hukum-ugm-zainal-arifin-tanggapi-kontroversi-film-dirty-vote/> (Accessed: 6 March 2024).
- Benyon, D. (2014) ‘Digital space’, in Benyon, D., *Spaces of Interaction, Places for Experience*. Cham: Springer International Publishing, pp. 37–44. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-02206-7_4.
- Carney, N. (2016a) ‘All lives matter, but so does race: black lives matter and the evolving role of social media’, *Humanity & Society*, 40(2), pp. 180–199. Available at: <https://doi.org/10.1177/0160597616643868>.
- Carney, N. (2016b) ‘All lives matter, but so does race: black lives matter and the evolving role of social media’, *Humanity & Society*, 40(2), pp. 180–199. Available at: <https://doi.org/10.1177/0160597616643868>.
- Carolina, R. (2024) “‘Dirty Vote’ documentary on alleged election fraud goes viral in Indonesia”, *Global Voices Advox*, 17 February. Available at: <https://advox.globalvoices.org/2024/02/17/dirty-vote-documentary-on-alleged-election-fraud-goes-viral-in-indonesia/> (Accessed: 3 March 2024).
- CNN (2024a) *Daftar kampus-kampus kritik jokowi dan pilpres 2024, nasional*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206081909-617-1059131/daftar-kampus-kampus-kritik-jokowi-dan-pilpres-2024> (Accessed: 27 February 2024).
- CNN (2024b) *Dandhy laksono jelaskan sumber dana produksi dirty vote, hiburan*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240212174417-220-1061554/dandhy-laksono-jelaskan-sumber-dana-produksi-dirty-vote> (Accessed: 6 March 2024).
- Democracy Index 2023 Age of Conflict* (2024). The Economist Intelligence Unit.
- Dirty Vote* (2024). Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE> (Accessed: 7 March 2024).
- Dirty vote* (2024). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Watchdoc. Available at: https://www.imdb.com/title/tt31251332/?ref_=tt_mv_close (Accessed: 12 March 2024).
- Eka Mulyana, K. (2024) *Film dirty vote telah ditonton lebih dari 6,4 juta kali hingga senin pagi, KOMPAS.tv*. Available at: <https://www.kompas.tv/nasional/484462/film-dirty-vote-telah-ditonton-lebih-dari-6-4-juta-kali-hingga-senin-pagi> (Accessed: 3 March 2024).
- Fisipol (2023) *Ahli politik fisipol ugm ungkap alasan demokrasi indonesia alami penurunan – fakultas ilmu sosial dan ilmu politik*. Available at: <https://fisipol.ugm.ac.id/ahli-politik-fisipol-ugm-ungkap-alasan-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/> (Accessed: 21 February 2024).
- Kelly Garrett, R. (2006) ‘Protest in an Information Society: a review of literature on social movements and new ICTs’, *Information, Communication & Society*, 9(2), pp. 202–224. Available at: <https://doi.org/10.1080/13691180600630773>.
- Khanna, A. (2012) ‘Seeing citizen action through an “unruly” lens’, *Development*, 55(2), pp. 162–172. Available at: <https://doi.org/10.1057/dev.2012.21>.
- Khanna, A. et al. (2013) *The changing faces of citizen action a mapping study through an ‘unruly’ lens*. Brighton IDS 2013 (IDS working paper, 423).
- Krisiandi and Wiryono, S. (2024) *Pengisi film ‘dirty vote’ mengaku diteror, ada upaya peretasan akun whatsapp, KOMPAS.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/17/17071631/pengisi-film-dirty-vote-mengaku-diteror-ada-upaya-peretasan-akun-whatsapp> (Accessed: 6 March 2024).
- Lettinga, D. and Kaulingfreks, F. (2015a) ‘Clashing activism: international human

- rights organizations and unruly politics', *Journal of Human Rights Practice*, 7(3), pp. 343–365. Available at: <https://doi.org/10.1093/jhuman/huv015>.
- Lettinga, D. and Kaulingfreks, F. (2015b) 'Clashing activism: international human rights organizations and unruly politics', *Journal of Human Rights Practice*, 7(3), pp. 343–365. Available at: <https://doi.org/10.1093/jhuman/huv015>.
- M. Taufik, U. (2024) *Dari busyro hingga uceng panaskan nobar dirty vote di ums, PWM Jawa Tengah*. Available at: <https://pwmjateng.com/dari-busyiro-hingga-uceng-panaskan-nobar-dirty-vote-di-ums/> (Accessed: 12 March 2024).
- Meliana, R. (2024) *Viral komentar-komentar tentang film dirty vote di tiktok, warga x miris: pentingnya pendidikan gratis, suara.com*. Available at: <https://www.suara.com/lifestyle/2024/02/13/114553/viral-komentar-komentar-tentang-film-dirty-vote-di-tiktok-warga-x-miris-pentingnya-pendidikan-gratis> (Accessed: 6 March 2024).
- Nugroho, A. (2024) *Bantah didanai asing, bivitri: kami patungan, sampai sekarang masih nombok, Rmol.id*. Available at: <https://rmol.id/politik/read/2024/02/20/610085/bantah-didanai-asing-bivitri-kami-patungan-sampai-sekarang-masih-nombok> (Accessed: 6 March 2024).
- Nurhadi (2024) *Inilah 3 alasan film dokumenter dirty vote tayang di masa tenang pemilu 2024, Tempo*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1832872/inilah-3-alasan-film-dokumenter-dirty-vote-tayang-di-masa-tenang-pemilu-2024> (Accessed: 5 March 2024).
- Pemilu 2024: Ironi kemunduran demokrasi di tangan Jokowi di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi* (2024) *BBC News Indonesia*. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go> (Accessed: 27 February 2024).
- Prastyo, D. (2024a) *Kata pakar hukum pidana ub soal film dirty vote, detikjatim*. Available at: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7190157/kata-pakar-hukum-pidana-ub-soal-film-dirty-vote> (Accessed: 21 February 2024).
- Prastyo, D. (2024b) *Kata pakar hukum pidana ub soal film dirty vote, detikjatim*. Available at: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7190157/kata-pakar-hukum-pidana-ub-soal-film-dirty-vote> (Accessed: 4 March 2024).
- Saptohutomo, A.P. (2023) *Pakar ungkap skala demokrasi indonesia terus menurun, KOMPAS.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/11375781/pakar-ungkap-skala-demokrasi-indonesia-terus-menurun> (Accessed: 21 February 2024).
- Sulistya, A.R. (2024) *Inilah 3 alasan film dokumenter dirty vote tayang di masa tenang pemilu 2024, Tempo*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1832872/inilah-3-alasan-film-dokumenter-dirty-vote-tayang-di-masa-tenang-pemilu-2024> (Accessed: 4 March 2024).
- Sahal, U. (2024) *Film dirty vote viral jelang pemilu, pakar hukum um surabaya beri tanggapan ini - universitas muhammadiyah surabaya(Umsurabaya), UMSurabaya*. Available at: <https://www.um-surabaya.ac.id/article/film-dirty-vote-viral-jelang-pemilu-pakar-hukum-um-surabaya-beri-tanggapan-ini> (Accessed: 5 March 2024).
- Septiawan, A. (2024) *Dirty vote ditonton 20 juta kali, zainal arifin mochtar: kami kalah di tiktok, detikjogja*. Available at: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7191624/dirty-vote-ditonton-20-juta-kali-zainal-arifin-mochtar-kami-kalah-di-tiktok> (Accessed: 3 March 2024).
- Sunudyantoro (2024) *Wawancara tiga pakar dirty vote, Tempo*. Available at: <https://koran.tempo.co/read/wawancara/487272/wawancara-tiga-pakar-dirty-vote> (Accessed: 27 February 2024).
- Tadros, M. (2011) *The politics of unruly ruptures, Institute of Development Studies*. Available at: <https://www.ids.ac.uk/publications/the-politics-of-unruly-ruptures/> (Accessed: 27 February 2024).

- Tempodotco (2023) *Skandal di Mahkamah Konstitusi dan Manuver Jokowi untuk Gibran | Bocor Alus Politik*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=z30vDjd1s3U> (Accessed: 7 March 2024).
- Update Kilat (2024) *Live zoom dirty vote*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=N00lxx2hf2Y> (Accessed: 12 March 2024).
- Van De Sande, M. (2013) 'The prefigurative politics of Tahrir square—an alternative perspective on the 2011 revolutions', *Res Publica*, 19(3), pp. 223–239. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11158-013-9215-9>.
- Widadio, N.A. (2024) *Pemilu 2024: Ironi kemunduran demokrasi di tangan Jokowi di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi*, *BBC News Indonesia*. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go> (Accessed: 27 February 2024).
- Zaki, M.F. (2024) *Kriminalisasi aktor dan sutradara dirty vote*, *Tempo*. Available at: <https://koran.tempo.co/read/hukum/487254/kriminalisasi-aktor-dan-sutradara-dirty-vote> (Accessed: 21 February 2024).